



# LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2025  
(LAKIP)**



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini terselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan wajib disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan memuat informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk hambatan yang dihadapi. Lakip ini juga memberikan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja semua program yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten Barito Selatan didukung oleh 1 (satu) Rumah Sakit, 1(satu) UPTD Labkesda dan 12 (Dua Belas) UPTD Pukesmas serta jaringannya di masing – masing kecamatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan laporan ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Buntok, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Barito Selatan,



dr. ~~DADANG~~ BASKORO NUGROHO, Sp.PD  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19720209 200212 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang Dihadapi .....	6
E. Sistematika Penyajian .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KESEHATAN</b>	
A. Perencanaan Kinerja.....	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup Dinas Kesehatan	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan (*Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan*) dan (*Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan*). Pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas maka disusun Laporan Kinerja Instansi Dinas Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategik (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kabupaten Barito Selatan merupakan suatu rencana jangka menengah Tahun 2025-2029 yang sangat menentukan dalam meningkatkan

kinerja Dinas Kesehatan dan memuat tujuan/sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2025.

Sesuai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2025 terdapat 1 Tujuan, 1 sasaran, dan 3 indikator kinerja utama, 5 program yang mendukung capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan harus dicapai serta dilaksanakan dengan dukungan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebesar Rp. 231.909.792.676

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 3 (tiga) indikator Utama, ada 2 indikator kinerja yang memenuhi target, dan ada 1 indikator yang belum memenuhi target.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dikembangkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- e. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat
- g. UPT (RSUD, Labkesda dan Puskesmas)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan maka tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Barito Selatan di bidang Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAH UTAMA YANG DIHADAPI**

### **1. Aspek Strategis**

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju





terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu.

**c. Aspek Pembiayaan Kesehatan**

Tabel 1.5 Alokasi Pembiayaan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Jumlah Alokasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	98.833.222.458,80
2.	Belanja Barang dan Jasa	107.238.411.367,20
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.661.033.850
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.117.250.000
5.	Belanja Modal Aset Lainnya	2.500.000.000
6.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.240.250.000
7.	Belanja Tidak Terduga	377.625.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>231.909.792.676</b>

Dari Tabel 1.5 diatas merupakan alokasi anggaran untuk Belanja Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas berdasarkan jenis sumber biaya.

**d. Aspek Wilayah**

Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu kota Kabupaten di Buntok terletak diantara 1° 20 ‘ Lintang Utara - 2 ° 35 ‘ Lintang Selatan dan 114 ° - 115 ° Bujur Timur. Diapit oleh tiga Kabupaten tetangga yaitu di sebelah utara dengan sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara, sebelah timur dengan sebagian wilayah Kabupaten Barito Timur, di bagian selatan dengan wilayah Kabupaten Kapuas dan Propinsi Kalimantan Selatan dan sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Kapuas.

Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah 8.830 km<sup>2</sup> yang meliputi enam kecamatan. Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Gunung Bintang Awai merupakan kecamatan terbesar dengan luas

masing-masing 2.065 km<sup>2</sup> dan 1.933 km<sup>2</sup> atau luas kedua kecamatan tersebut mencapai 45,28 % dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan. Sebaliknya kecamatan yang luasnya paling kecil adalah Kecamatan Jenamas yaitu 708 km<sup>2</sup> atau 8,02 % luas wilayah kabupaten.

Secara administratif Kabupaten Barito Selatan terdiri atas 6 kecamatan, yang terdiri dari 86 desa dan 7 Kelurahan. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran dan perairan yang cukup menguntungkan ialah bagi masyarakat yang tinggal di daerah daratan karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari kelurahan dalam satu Kecamatan ke Puskesmas hanya ± 2,5 Km.

Tabel 1.6 Jarak Puskesmas hubungannya dengan Situasi Geografis Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa/Kelurahan	Puskesmas	Rataprata waktu Tempuh dari Kabupaten Ke Puskesmas
1	Jenamas	708	5	Puskesmas Jenamas	210 menit
2	Dusun Hilir	2.065	10	Puskesmas Mengkatip	150 Menit
3	Karau Kuala	1.099	11	Puskesmas Bangkuang, Babai	100 Menit
4	Dusun Selatan	1.829	27	Puskesmas Buntok, Baru, Kalahien, dan Sababilah	15-30 Menit
5	Dusun Utara	1.196	19	Puskesmas Pendang, Bantai Bambure	100-150 Menit

6	G. Bintang Awai	1.933	21	Puskesmas Patas I, Taba Kanilan	60-120 Menit
---	-----------------	-------	----	---------------------------------	--------------

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, 2025

## 2. Aspek Permasalahan Yang Dihadapi dan Strategi Dinas Kesehatan

### a. Aspek Permasalahan Yang Dihadapi

Prioritas masalah utama kesehatan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 berdasarkan Isu-isu strategis yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 adalah masih cukup tingginya Kematian Ibu (AKI) menurut standar SDGs, Masih adanya kasus kematian pada bayi, tingginya prevalensi stunting.

Secara nasional Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah menurun dari 305 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup (Survei Penduduk Antar Sensus, 2015) menjadi 189 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup (Sensus Penduduk, 2020). Hasil tersebut menunjukkan sebuah penurunan yang signifikan, bahkan jauh lebih rendah dari target di tahun 2022 yaitu 205 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup. Pencapaian tersebut harus tetap dipertahankan, bahkan didorong menjadi lebih baik lagi untuk mencapai target di Tahun 2024 yaitu 183 Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup dan > 70 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup di Tahun 2030. Berdasarkan hasil Sample Registration System (SRS) Litbangkes Tahun 2016, tiga penyebab utama kematian ibu adalah gangguan hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan komplikasi non obstetrik (15,7%). Sedangkan berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) tanggal 21 September 2021, tiga penyebab teratas kematian ibu adalah Eklamsi (37,1%), Perdarahan (27,3%), Infeksi (10,4%) dengan tempat/lokasi kematian tertingginya adalah di Rumah Sakit (84%).

Secara nasional Angka Kematian Bayi (AKB) telah menurun dari 24 kematian per 1.000 Kelahiran Hidup (SDKI, 2017) menjadi 16,85 kematian per 1.000 Kelahiran Hidup (Sensus Penduduk, 2020). Hasil tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan melampaui target di tahun 2022 yaitu 18,6% kematian per 1.000 Kelahiran Hidup. Hal tersebut harus tetap dipertahankan guna mendukung target di Tahun 2024 yaitu 16

kematian per 1.000 Kelahiran Hidup dan 12 kematian per 1.000 Kelahiran Hidup di Tahun 2030. Berdasarkan hasil Sample Registration System (SRS) Litbangkes Tahun 2016, tiga penyebab utama kematian bayi terbanyak adalah komplikasi kejadian intrapartum (28,3%), gangguan respiratori dan kardiovaskuler (21,3%) dan BBLR & Prematur (19%). Sedangkan berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) tanggal 21 September 2021, tiga penyebab teratas kematian bayi adalah BBLR (29,21%), Asfiksia (27,44%), Infeksi (5,4%) dengan tempat/lokasi kematian tertingginya adalah di Rumah Sakit (92,41%).

Masalah kesehatan masyarakat lainnya yang juga masih menjadi fokus utama adalah Stunting (pendek dan sangat pendek). Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Sedangkan wasting adakah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Secara nasional prevalensi stunting mengalami penurunan, dari 24,4% di tahun 2021 (Survei Status Gizi Indonesia, 2021) menjadi 21,6% di Tahun 2022 (Survei Status Gizi Indonesia, 2022). Hasil tersebut merupakan hal baik namun masih perlu peningkatan, karena masih dibawah target Tahun 2022 yaitu 18,4%. Diperlukan usaha dan Kerjasama antar Lintas Program dan Sektor yang kuat guna mencapai target RPJMN Tahun 2024 yaitu 14%. (Sumber : Data Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2022)

Dari permasalahan diatas, Peningkatan Derajat Kesehatan ibu dan anak merupakan isu strategis yang utama dikarenakan tidak hanya terjadi dikabupaten barito Selatan tetapi juga di Tingkat provinsi dan Pusat. Indikator kinerja terkait Kesehatan ibu dan anak juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan Kesehatan disuatu daerah.

Di Kabupaten Barito Selatan angka kematian ibu pada tahun 2024 ialah 70,52 Per 100.000 Kelahiran hidup atau jumlah kematian sebanyak 1 orang yang disebabkan oleh kejadian gangguan hipertensi dan penyebab lainnya. Capaian Angka Kematian Ibu sebenarnya sudah memenuhi target tahun 2024. Sedangkan angka kematian pada bayi tahun 2024 ialah 11,9 Per 1.000 Kelahiran Hidup atau jumlah kematian sebanyak 19 (sembilan belas) bayi (neonatal usia 0 – 28 hari dan post neonatal 29 hari – 11 bulan) disebabkan karena BBLR dan premature (11 bayi), Asfiksia (2 Bayi) infeksi (2 bayi), kelainan kongenital (2 bayi), dan kelainan kongenital /Post neonatal (2 bayi). Angka kematian bayi tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 dan belum memenuhi capaian target tahun 2024. Prevalensi stunting tahun 2024 di kabupaten Barito Selatan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 adalah 33,3 % meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 23,9% (Survei Kesehatan Indonesia), hasil survei ini tentu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Penanganan dan Pencegahan terjadinya kasus stunting di daerah.

Untuk mempertegas bahwa Kematian Ibu, bayi dan prevalensi stunting menjadi permasalahan utama berikut capaian indikator-indikator terkait dengan Kesehatan ibu dan Anak di Kabupaten Barito Selatan dibandingkan dengan capaian indikator pada Lembaga Teknis (Kementerian Kesehatan) dan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2022 :

**Tabel 1.7 Capaian Indikator Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2022 di Kabupaten Barito Selatan dibandingkan dengan capaian Kementerian Kesehatan dan provinsi Kalimantan Tengah.**

No	Indikator Kinerja	Kemenkes	Dinkes Provinsi Kalteng	Dinkes Kab. Barito Selatan	Keterangan
1	AKI (Angka Kematian Ibu)	189 (sensus penduduk 2020)	149	274	Kab. Barsel lebih tinggi dibandingkan dengan Kemenkes dan Provinsi Kalteng
2	AKB (Angka Kematian)	16,85 (sensus penduduk)	8,6	7,1	Kab. Barsel lebih rendah dibandingkan

	Bayi)	2020)			dengan Kemenkes dan Provinsi Kalteng
3	Prevalensi balita stunting	21,6% (SSGI 2022)	26,9	35,6	Kab. Barsel lebih tinggi dibandingkan dengan Kemenkes dan Provinsi Kalteng
4	Angka Harapan Hidup	73,6	70,04	67,48	Kab. Barsel lebih rendah dibandingkan dengan Kemenkes dan Provinsi Kalteng

Dari Tabel capaian indikator diatas diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator hanya 1 (satu) indikator yang capaiannya lebih bagus yaitu angka kematian bayi yang artinya jumlah kejadian kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 lebih sedikit dari pada jumlah kematian bayi di Tingkat nasional dan Provinsi Kalteng. Meskipun lebih bagus capaiannya akan tetapi kematian bayi tetap menjadi prioritas mengingat trend kejadian kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 (7,1) meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 (2,4).

Ada 3 (tiga) capaian indikator pada tahun 2022 di Kabupaten Barito Selatan capaiannya dibawah Kementerian Kesehatan dan dibawah Provinsi Kalteng yaitu Angka Kematian Ibu, Prevalensi Stunting dan Angka Harapan Hidup sehingga hal ini menjadi permasalahan yang perlu diatasi dan menjadi target indikator kinerja utama Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 sampai dengan 2026 guna untuk mengambil Langkah-langkah strategis menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, prevalensi stunting dan peningkatan umur harapan hidup

**- Strategi Dinas Kesehatan**

Dalam mendukung Percepatan Penurunan AKI dan AKB, serta Percepatan Penurunan Stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan



	pengelolaan Posyandu - Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran - Transport Rujukan Pelayanan Ibu Melahirkan - Pembinaan Pelaksanaan dan Penggerak Masyarakat (Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Jambore Kader, Aktifkan Posyandu, Vaksinasi bersama Mitra/keompok Masyarakat - Penguatan kualitas SDM Tenaga Kesehatan dan kader melalui bimtek dan pelatihan.	
--	--	--

**E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini.

**Bab I** – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi..

**Bab II** – Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

**Bab III** – Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan dilakukan perbandingan antara capaian dengan realisasi tahun ini, tahun yang

lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;, membandingkan dengan target standar nasional, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

**Bab IV** – Penutup, menjelaskan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Sesuai dokumen renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 indikator tujuan dan sasaran dinas Kesehatan terdiri dari indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito  
Selatan tahun 2025-2029**

Indikator	Target Tahun						Ket.
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kh	122	109	97	86	77	70	(IKU PD Ess.II)
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kh	9,2	7,2	5,6	4,2	3,5	2,1	(IKU PD Ess.II)
Prevalensi Stunting	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14	(IKU PD Ess.II)
Cakupan kesepertaan Jaminan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	Inidkator Kinerja Ess.III
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	94,85	95,17	95,17	95,17	95,17	95,17	Inidkator Kinerja Ess.III
Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	100	100	100	100	100	100	Inidkator Kinerja Ess.III
Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman	100	100	100	100	100	100	Inidkator Kinerja Ess.III
Persentase masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	100	100	100	100	100	100	Inidkator Kinerja Ess.III
Persentase	100	100	100	100	100	100	Inidkator

elayanan Kesehatan yang terakreditasi							Kinerja Ess.III
Nilai SPIP Dinas Kesehatan	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	4,0	Indikator Kinerja Ess.III
Nilai Sakip Dinas Kesehatan	70	71	72	73	75	76	Indikator Kinerja Ess.III

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ialah ada 1 (satu) indikator terkait dengan bidang Kesehatan yaitu Angka harapan hidup.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan target kinerja berupa komitmen dalam pencapaian target tahun 2025. Sebagai wujud komitmen dalam manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan target kinerja tahun 2025 ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan yang merupakan upaya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Bupati Barito Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. DADANG BASKORO NUGROHO, Sp.PD.**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**

Jabatan : Bupati Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan memberikan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 29 September 2025

PIHAK KEDUA,  
  
EDDY RAYA SAMSURI

PIHAK PERTAMA,  
  
dr. DADANG BASKORO NUGROHO, Sp.PD  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19720209 200212 1 001

PIHAK KEDUA,  
  
EDDY RAYA SAMSURI

Buntok, 29 September 2025  
PIHAK PERTAMA,  
  
dr. DADANG BASKORO NUGROHO, Sp.PD  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19720209 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
I	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	122
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran Hidup	9,2
		Prevalensi stunting	Persentase	18,8

**Program Dinas Kesehatan Tahun 2025:**

Program	Anggaran (Rp)
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	136.455.217.542
II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.230.541.586
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.986.274.000
IV. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	166.560.500
V. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	383.542.000
<b>Total</b>	<b>222.222.135.628</b>

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Indikator yang termasuk kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja adalah 3 (tiga) Indikator kinerja, yaitu : 1) Angka Kematian Ibu, 2) Angka Kematian Bayi, 3) Prevalensi Balita Stunting.

Definisi operasional dan cara perhitungan indikator yang tertuang pada perjanjian kinerja tersebut yaitu :

**Tabel 2.2 Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja**

No	Indikator	Definis Operasional	Cara Perhitungan
1	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran Hidup	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di Kabupaten Barito Selatan dalam satu tahun	Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di Kabupaten Barito Selatan oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma per jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama.
2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri per Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama
3	Prevalensi Balita Stunting	Persentase balita usia 0 - 59 bulan dengan kategori	(Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di

		<p>status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-Score kurang dari -2 Standar Deviasi.</p>	<p>bawah -3 SD di Kabupaten Barito Selatan / jumlah balita yang diukur di Kabupaten Barito Selatan) x 100</p>
--	---	--	---



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2029, Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan target dari masing-masing Indikator Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

#### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan disertai dengan analisis faktor pendukung, faktor penghambat, serta alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 diuraikan sesuai dengan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2029, yang dikuatkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Data Capaian kinerja didapat dari pengelola data Kesehatan pada bidang Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan seperti Angka Kematian ibu, Angka Kematian bayi dan Prevalensi Stunting.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan bersama antar internal Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yaitu Bidang dan Sekretariat dan atau UPT Puskesmas dan RSUD di Kab.Barito Selatan. Pertemuan / Rapat pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:



- 1) Pertemuan pemantauan dan evaluasi kinerja (Rapat Koordinasi) triwulan I dilaksanakan pada tanggal 24 - 25 April 2025;
- 2) Pertemuan pemantauan dan evaluasi kinerja (Rapat Koordinasi) triwulan II dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 Agustus 2025;
- 3) Pertemuan pemantauan dan evaluasi kinerja (Rapat Koordinasi) triwulan III dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 Oktober 2025; dan
- 4) Pertemuan pemantauan dan evaluasi kinerja (Rapat Koordinasi) triwulan IV dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Desember 2025.

Dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan memuat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut adalah realisasi capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 :

**Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Sumber data</b>
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	$\leq 122$	85	100 %	Tabel Profil Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	Per 1000 Kelahiran Hidup	$\leq 9,2$	6	100 %	Tabel Profil Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
Prevalensi Balita Stunting (Survei Nasional)	%	$\leq 18,8 \%$	19,06 %	98 %	Data EPPGBM 2025 (SSGI 2025 belum rilis)

Berdasarkan Tabel 3.1, bahwa dari 3 indikator kinerja ada 2 (dua) indikator yang sudah mencapai target yaitu Capaian Angka kematian ibu dengan capaian 85 Per 100.000 Kelahiran Hidup (100%) sedangkan 1 (satu) indikator belum mencapai target yaitu Prevalensi Balita Stunting 19,06 % (98%), Penjelasan mengenai faktor pendukung, faktor penghambat dan Solusi alternatif dalam permasalahan serta perbandingan antara capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan capaian kinerja Dinas

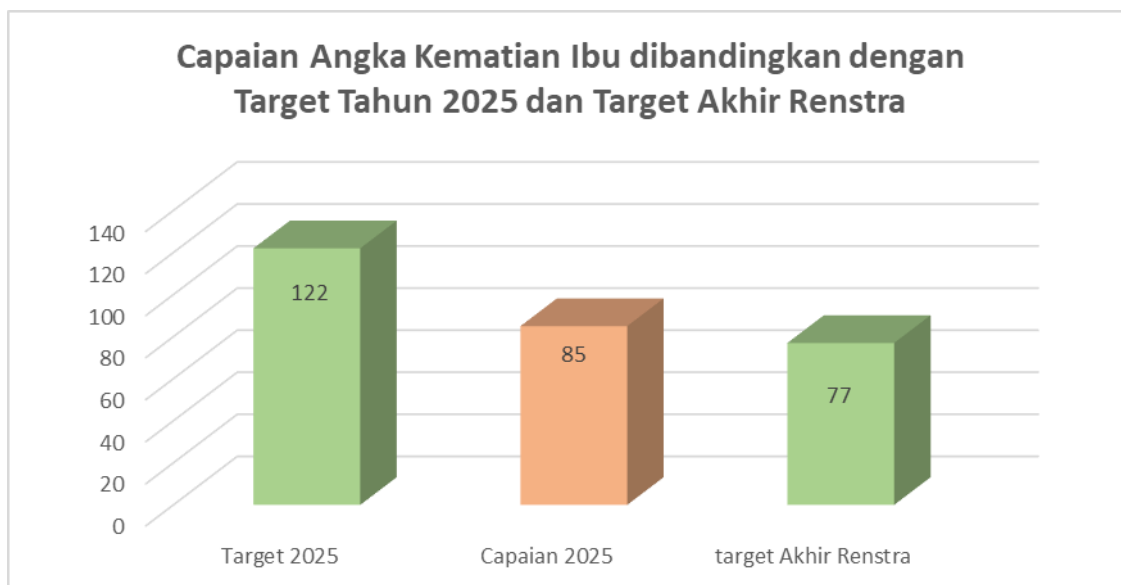
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Capaian Nasional akan dibahas pada subbab evaluasi dan analisa capaian kinerja.

## A. 1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

### A.1.1 Angka Kematian Ibu

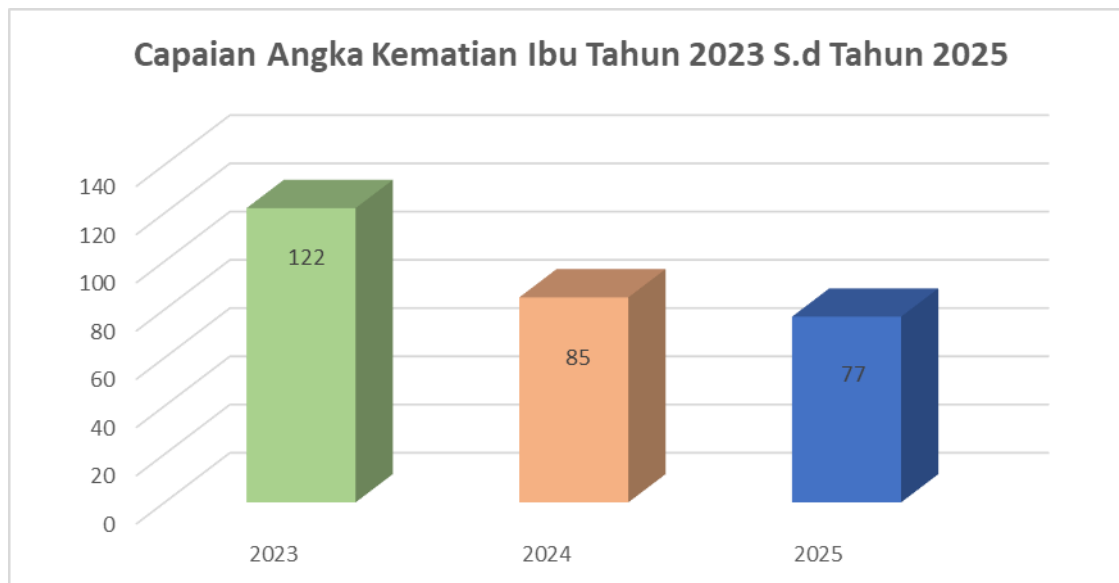
Jumlah kematian ibu ialah Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Capaian Jumlah kematian jika semakin sedikit dari target maka capaian lebih baik (Indikator negative). Pada tahun 2025 jumlah kejadian kematian ibu ialah 2 (satu) orang atau capaian 85 per 100.000 kelahiran hidup (100%) dari target maksimal 122 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian jumlah kematian ibu tahun 2025 sudah mencapai target. Berikut akan disajikan gambar terkait analisis capaian angka kematian ibu :

Grafik 3.1 Capaian Angka Kematian Ibu dibandingkan dengan target dan target akhir masa Rentra Dinas Kesehatan



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja angka kematian ibu tahun 2025 sudah mencapai target tahun 2025, dan untuk pencapaian dibandingkan target akhir Renstra memang masih belum mencapai target masih ada masa waktu 4 tahun untuk pencapaian target akhir renstra yakni di tahun 2029. Kejadian kasus kematian terjadi di desa Kalahien dan Kelurahan Pendang.

Grafik 3.2 Capaian Jumlah Kematian Ibu Tahun 2024 Sampai Dengan tahun 2025



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat trend pencapaian angka kematian ibu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang mana capaian mengalami penurunan secara signifikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran tenaga kesehatan yang ada ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten, dan Kerjasama yang baik dan adanya peran lintas sektor untuk penanganan kesehatan ibu dan anak.

Grafik 3.3 Grafik Perbandingan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah



Dari grafik 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian ibu di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian di kabupaten Barito Selatan menunjukkan hasil







Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan lebih sedikit dari pada angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini artinya kasus kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan lebih rendah dari kasus kematian di Tingkat provinsi Kalimantan Tengah.

#### **A.1.4 Prevalensi Balita Stunting**

Capaian Prevalensi Balita Stunting ialah Persentase balita usia 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-Score kurang dari -2 Standar Deviasi. Formulasi Prevalensi Balita Stunting yakni Jumlah balita dengan(tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di Kabupaten Barito Selatan dibagi jumlah balita yang diukur di Kabupaten Barito Selatan) dikali 100.

Capaian prevalensi stunting tahun 2025 berdasarkan dari 2 (dua) hasil data yaitu SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), dan data EPPGBM tahun 2025, untuk data berdasarkan SSGI masih belum rilis sehingga menggunakan data EPPGBM Berikut capaian prevalensi stunting tahun 2025 dapat dilihat dari grafik berikut.

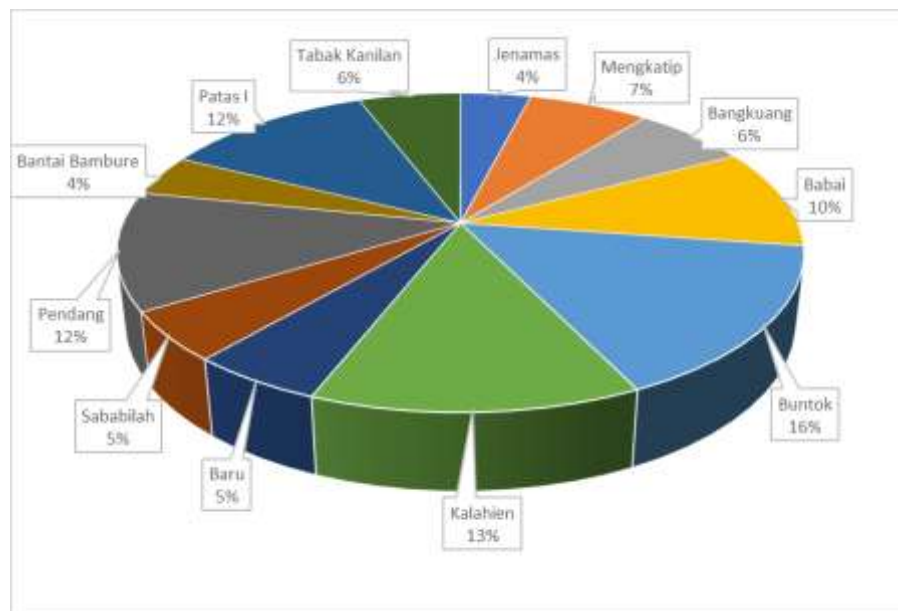
Gambar 3.7 Grafik Capaian Prevalensi Balita Stuting Tahun 2025



Berdasarkan gambar 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2025 belum mencapai target, dengan capaian 19,06% dari target sebesar 18,8%. Capaian ini berdasarkan data Survei EPPGBM tahun 2025.

Berikut sebaran kasus prevalesi stunting berdasarkan wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Barito Selatan :

Gambar 3.8 Persentase Sebaran prevalesi stunting berdasarkan wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Barito Selatan



Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa prevalensi stunting terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Buntok dan yang paling sedikit kasus pada puskesmas






Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan dan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>I.</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1. Angka Kematian Ibu : 122 Per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	<b>1. Angka Kematian Ibu : 85 Per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	<b>100 %</b>	-Meskipun capaian diatas sudah memenuhi target akan tetapi permasalahan dilapangan masih ada dirasakan diantaranya yakni masih adanya akses yang cukup sulit seperti jalan yang rusak dan akses yang jauh bagi Masyarakat untuk perawatan maupun melahirkan ke Kabupaten	- Masukan ke Pemerintah daerah dan SOPD terkait untuk perbaikan akses jalan dan mempermudah jangkauan dari desa ke kabupaten.	88.995.745.076	78.132.147.210,06
1.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>2. Angka Kematian Bayi (AKB) : 9,2 Per 1000 Kelahiran Hidup</b>	<b>2. Angka Kematian Bayi (AKB) : 6 Per 1000 Kelahiran Hidup</b>	<b>100 %</b>				
2.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>3. Prevalensi Balita Stunting : 18,8 %</b>	<b>3. Prevalensi Balita Stunting : 19,06 %%</b>	<b>98 %</b>				
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							
4.	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan</b>						<b>2.986.274.000</b>	<b>2.809.967.765</b>
1.	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				- Masih adanya persalinan bukan difasilitas	- Memberikan edukasi ke ibu hamil dan keluarga bahwa pentingnya	186.362.000	185.704.500
2.	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
<b>III.</b>	<b>Kesehatan Dan Makanan Minuman</b>							
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko							

<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>IV.</p> <p>1.</p> <p>2.</p>	<p>Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <p>Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p> <p><b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b></p> <p>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>				<p><b>Kesehatan sehingga penanganan bayi baru lahir yang sakit tidak diketahui.</b></p> <p>- kurang optimalnya pelayanan bayi baru lahir di desa disebabkan sarana, prasarana dan alat Kesehatan tidak memadai.</p> <p>- Ada beberapa kasus penyebab stunting yaitu karena adanya infeksi yang dialami oleh balita sehingga perkembangan tumbuh</p>	<p><b>persalinan di fasilitas Kesehatan.</b></p> <p>- Menginventarisasi sarana, prasarana dan alat Kesehatan di desa guna perencanaan perbaikan segera.</p> <p>- Melakukan deteksi dini pada bayi/balita seperti cek krining Hipotiroid Kongenital (SHK), pemberian vaksin dan penanganan segera jika diperlukan dan melakukan rujukan ke fasilitas Tingkat</p>	<p>366.070.500</p>	<p>207.587.200</p>
--	---	--	--	--	---	---	--------------------	--------------------

					<p>kembang terganggu/ terhambat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya kebiasaan Masyarakat yang tidak mau memeriksakan tumbuh kembang balita ke posyandu terdekat sehingga deteksi dini permasalahan gizi balita tidak diketahui oleh tenaga Kesehatan.</li> </ul>	<p>pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan edukasi atau konseling Kesehatan balita dan nutrisi asupan balita untuk mencegah kurang gizi dan mengajak ibu beserta keluarga yang memiliki balita untuk memeriksakan tumbuh kembang balita di posyandu / fasilitas Kesehatan</li> <li>- Mengkampanyekan Gerakan peduli Kesehatan balita dengan rutin memeriksakan balita ke fasilitas Kesehatan guna deteksi dini pencegahan.</li> </ul>		
V	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota						138.997.716.100	144.093.427.562, 7



1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kegiatan Kinerja						
2	Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD						
<b>JUMLAH</b>						<b>231.909.792.676</b>	<b>224.909.961.737,76</b>
<b>Persentase Realisasi Belanja : 96,98 % dan Persentase Fisik : 97 %</b>							

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Kesehatan yang tertuang dalam renstra dan perjanjian kinerja yang sudah mencapai target sudah bersesuaian dengan realisasi belanja ditahun 2025 yang diatas 95 % atau mendekati 100%..



spesifik (kesehatan) dan sensitif (non-kesehatan). Tindakan utama meliputi pemberian ASI eksklusif, MPASI kaya protein hewani, suplementasi zat besi (TTD) bagi ibu hamil, serta pemantauan rutin di Posyandu untuk balita.

- Penguatan basis data berupa peningkatan akurasi, integrasi, dan pemutakhiran data di daerah (terintegrasi)
- Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di desa
- Tetap memberdayakan/penguatan kapasitas kader posyandu melalui pelatihan dan bimbingan teknis
- Memaksimalkan peran tenaga kesehatan di desa dan menjamin kenyamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang ada di desa.